

ABSTRAK

Fiorena Gita Susmayanti. 2026. *Kepastian Hukum Penentuan Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H.,M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma,S.H.,M.Kn.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup mengingat korporasi sering menjadi pelaku utama pencemaran lingkungan. Namun, penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana masih menimbulkan permasalahan yuridis. Permasalahan tersebut terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggunakan frasa "dan/atau", sehingga membuka ruang multitafsir mengenai pihak yang bertanggung jawab, yaitu korporasi, pengurus, atau keduanya secara bersamaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum dan mengurangi efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penentuan subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta mengkaji kepastian hukum yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengadopsi *identification theory* serta teori organ dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban antara korporasi, pemberi perintah, dan pemimpin kegiatan. Penggunaan frasa "dan/atau" masih menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) sehingga membuka ruang multitafsir, disparitas putusan, dan inkonsistensi penegakan hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Utrecht serta asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum. Analisis terhadap PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menunjukkan bahwa PERMA telah memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, namun belum mampu mengatasi kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 116 karena kedudukannya hanya sebagai peraturan pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan rumusan Pasal 116 agar kriteria penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab dirumuskan secara lebih tegas sehingga menjamin kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Subjek Hukum, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pencemaran Lingkungan Hidup, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.*

ABSTRACT

Fiorena Gita Susmayanti. 2026. *Legal Certainty in the Determination of Legal Subjects in Corporate Criminal Liability for Environmental Pollution (Analysis of Article 116 of Law Number 32 of 2009)*. Thesis. Law Study Program, FH, University of PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

*Corporate criminal liability is an important instrument in environmental law enforcement, given that corporations are frequently the primary perpetrators of environmental pollution. However, determining the legal subject liable for criminal prosecution remains a source of legal ambiguity. This issue arises from Article 116 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which employs the phrase "and/or," thereby creating room for multiple interpretations regarding the party to be held accountable whether the corporation, its management, or both simultaneously. This situation risks causing inconsistencies in law enforcement practices and undermining the effectiveness of corporate criminal liability. This study aims to analyze the regulatory framework for determining legal subjects in corporate criminal liability for environmental pollution under Article 116 of Law Number 32 of 2009 and to examine the associated legal certainty. Employing a normative legal research methodology, the study utilizes both statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Article 116 of Law Number 32 of 2009 as amended by Law Number 6 of 2023 (which ratified Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into law) recognizes corporations as subjects of criminal law and adopts the "identification theory" and "organ theory" to establish corporate criminal liability. Nevertheless, the provision fails to provide clear parameters regarding the boundaries of liability among the corporation, the person issuing the order, and the person in charge of the activity. The use of the phrase "and/or" results in a vague norm, leading to multiple interpretations, disparities in court rulings, and inconsistencies in law enforcement. Based on the legal certainty theories of Gustav Radbruch and Utrecht, as well as the principle of legality specifically the principles of *lex certa* and *lex stricta* the provision in question does not yet fully satisfy the requirements of legal clarity, consistency, and predictability. An analysis of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases Involving Corporations reveals that, while the regulation provides technical guidelines for law enforcement officials regarding corporate criminal liability, it fails to resolve the normative ambiguity found in Article 116, given its status merely as an implementing regulation. Therefore, the formulation of Article 116 requires refinement to establish more precise criteria for identifying the legally liable party, thereby ensuring legal certainty and consistency in the enforcement of environmental criminal law.*

Keywords: *Legal Certainty, Legal Subjects, Corporate Criminal Liability, Environmental Pollution, Article 116 of Law Number 32 of 2009.*